

BNN Tegas Tolak Legalisasi Ganja

JAKARTA (KR) - Badan Narkotika Nasional (BNN) secara tegas menolak legalisasi ganja karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika jenis ganja sama sekali dilarang di Indonesia.

"Kita adalah negara hukum, artinya kita menegakkan hukum-hukum positif. Kalau dalam hukum positifnya terkait pengaturan narkotika ada di UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan 1 tidak diperbolehkan untuk kepentingan obat, dan ganja termasuk ke dalam Golongan 1 maka dalam proses penegakan hukum dan hukum positif tidak mungkin untuk dilegalkan," ujar Direktur Hukum/Pt Deputi Hukum dan

Kerja Sama BNN Susanto kepada *Antara* usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa (5/7).

Kendati demikian Susanto mengatakan, sebagaimana disampaikan oleh pengamat hukum Asmin Fransiska (Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya), kalau mau bukan legalisasi ganja, tetapi regulasi.

Dalam FGD bertema RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009, Asmin Fransiska meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam kata legalisasi, mengingat dalam kebijakan narkotika secara umum terdapat tahapan-tahapan.

Tahapan pertama adalah kriminalisasi

yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Kedua adalah dekriminialisasi, dimana mengeluarkan aspek-aspek penghukuman bagi pengguna narkotika untuk kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam kapasitas tertentu.

Tahapan berikutnya adalah regulasi. Banyak negara melakukan kontrol terhadap penggunaan secara berlebihan (overused), ataupun semacam euforia pada saat legalisasi narkotika, melalui regulasi. "Regulasinya seperti apa? Untuk penggunaan ganja medis hanya boleh dengan melakukan uji laboratorium terlebih dahulu, mengajukan perizinan, membuat apotek tertentu dan ditujukan untuk pasien tertentu," kata Asmin Fransiska. (Ant)-f

Kurangi

menjadi ekonomi inklusif. Idealnya, ekonomi seharusnya mengikuti budaya, karena budaya Yogyakarta sudah menerima perbedaan suku dan adat.

la mengungkapkan, dengan ekonomi Yogyakarta yang belum inklusif menjadikan pertumbuhan kota sedikit bermasalah. Pertumbuhan kota, dalam pandangannya, tidak berpijak pada *culture* yang ada di masyarakat.

"Justru yang kita lihat ekonomi di Yogyakarta sepertinya merespons perkembangan kota besar, padahal kalau kota-kota besar *kan* kehidupan ekonominya cenderung eksklusif," jelasnya.

Untuk itu, menurut Derajat, pengelolaan ekonomi di Yogyakarta seharusnya inklusif. Artinya, pengelolaannya harus disepakati secara bersama. Adanya tempat-tempat hiburan,

karaoke mestinya harus diikuti adanya ketentuan yang ditaati atau dijunjung tinggi, sehingga jika kemudian terjadi konflik ada yang menjadi penengah.

"Perbedaan dengan Bali, misalnya. Di Bali memiliki pecalang atau polisi adat. Meski tidak perlu seperti itu, tetapi setidaknya aparat pemerintah daerah mestinya cara berpikirnya sudah inklusif. Ini yang jadi masalah di Yogyakarta, masyarakatnya sudah *multi culture*, tetapi bisnisnya belum inklusif," terangnya.

Yogyakarta sebenarnya butuh ketenangan dan fasilitas-fasilitas mahasiswa yang diperbanyak, bukan fasilitas yang mengundang konflik. Regulasinya tidak harus seperti kota-kota besar lainnya. "Wilayah Yogyakarta itu istimewa, tetapi regulasinya tidak. Regulasinya seperti perkembangan ko-

Pembak

penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para pelaku kejahatan jalanan lainnya. Penegakan hukum harus dilakukan kepada siapa saja yang terbukti bersalah.

"Bagi pelaku yang terbukti bersalah tidak saja. Kalau melanggar hukum, ditindak saja. Dengan begitu tidak akan main-main. *Masak* ada korban tidak ditindak, yang kejahatan jalanan saja kita tindak. Jadi kita harus adil untuk penegakan hukum, jangan pilih-pilih," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Selasa (5/7).

Sultan mempersilahkan setiap orang dari berbagai penjuru nusantara untuk datang, menuntut ilmu atau bahkan tinggal di DIY. Namun, Sultan berharap kepada mereka (pendatang) agar bisa menyesuaikan diri dimana mereka berada atau tinggal. Termasuk dengan budaya yang ada di masyarakat setempat. Sementara itu, aktivitas perekonomian

yang sempat terganggu di wilayah itu, kemarin berangsur normal. Pemilik ruko di sekitar lokasi kerusuhan, mulai membuka tempat usaha mereka. Sementara pemilik ruko yang terdampak, juga terlihat membersihkan puing-puing. Mereka tidak sendiri, namun melakukan aksi bersih-bersih bersama seratus orang lebih dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) Kepanewon Depok dan lintas komunitas. "Hari ini (kemarin) ada bersih-bersih. Kami berharap masyarakat segera beraktivitas dengan lancar dan tidak perlu trauma dengan kejadian kemarin," ujar Kapolsek Depok Barat AKP Mega Tetuko SIK.

Polisi memastikan, keamanan di sekitar lokasi sudah kondusif dan personel tetap disiagakan di lokasi. Dari pantauan koran ini, saat bersih-bersih, polisi menemukan minuman beralkohol yang disimpan dalam sebuah tempat di depan ruko Babarsari.

'Dhupak Jogja'

Mentalitas mereka adalah tidak peduli meskipun dirinya hancur (*awak lebur ora weruh*). Mereka tidak takut mati bahkan bangga kalau bisa mati karena tidak menghargai kehidupan, mati ya sudah (*modar yo wis*). Orang-orang seperti ini tidak bisa dinasihati dengan lemah lembut, tidak bisa diajak diskusi, tidak bisa diajak berembung. Terhadap orang-orang seperti ini, kita harus bisa menegur dengan tegas seperti tindakan men-*dhupak* yang secara harfiah menendang.

Adapun level *bupati* menunjuk pada para pemimpin dan pejabat. Mereka adalah orang-orang terdidik yang mestinya juga berpekerja baik. Mereka seharusnya peka dan selalu mawas diri. Untuk menegur mereka semestinya tidak perlu dengan cara men-*dhupak* tetapi cukup dengan senyuman (*esem*) yang bermakna (*smile meaningfully*). Rakyat cukup mengkritik dan memprotes secara simbolik dan seharusnya para pemimpin peduli, sadar, dan introspektif. Rakyat Yogya paham bagaimana mengkritik pemimpin dengan cara simbolik yang santun dan ramah bahkan menghibur.

Adapun seorang raja (*narendra*) seharusnya jauh lebih tanggap (*tanggap ing sasmita*). Sehingga tanpa dikritik pun ia su-

dah selalu mawas diri. Raja yang bijaksana memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi. Rakyat pun, meskipun tidak bicara tetapi hanya berekspresi *laku pepe* di alun-alun, seorang raja langsung paham apa suara hati nurani rakyatnya itu dan menyikapinya dengan bijak.

Konsep kontrol sosial *dhupak bujang, esem bupati, sasmita narendra* menunjukkan realita masyarakat di Yogya yang beragam. Ada kelas orang-orang kasar yang bodoh, ada kelas pemimpin, dan ada raja. Mekanisme kontrol sosial itu berfungsi untuk menjaga harmoni masyarakat. Kita tidak bisa bermain *dhupak* terhadap semua orang. Pemimpin apalagi raja perlu dihormati tetapi juga perlu dikritik dengan cara-cara yang intelek dan berbudaya. Namun terhadap perusuh, perusak, pelaku kekerasan, pengacau harus benar-benar di-*dhupak*.

Untuk melakukan *dhupak-an* itu, kebudayaan juga memiliki sistem dan mekanismenya sendiri, yaitu melalui aspek khusus kebudayaan yang disebut hukum. Para ahli seperti Ter Haar dan L Pospisil telah lama memikirkan perbedaan dan pentingnya sinergi antara hukum dan kebudayaan (Koentjaraningrat, 1981). Hukum adalah bagian dari kebudayaan yang mempunyai

kekuatan untuk men-*dhupak* warga masyarakat (warga negara) yang bersalah. Sedangkan kebudayaan, meskipun memiliki sistem norma dan adat istiadat, lebih mengedepankan pendekatan moral. Menurut Koentjaraningrat (1981), hukum adalah sistem norma sosial yang memiliki otoritas politis kenegaraan (*attribute of authority*), penerapan universal (global) untuk jangka panjang (*attribute of intention of universal applicator*), ada mekanisme keputusan dari pemegang kekuasaan untuk mengatur hak dan kewajiban (*attribute of obligation*), dengan sistem sanksi (*attribute of sanction*).

Dengan demikian para aparat penegak hukum memiliki fungsi kultural untuk melakukan tindakan tegas bagi para pelaku kejahatan. Masyarakat justru jangan main *dhupak*.> (main hakim sendiri) sebab itu menyebabkan konflik horizontal bahkan perang saudara. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Pemimpin dan raja juga harus tetap kalem supaya jangan menjadi rezim otoriter dan tiran. Tetapi aparat penegak hukum tidak boleh ewuh-pakewuh untuk men-*dhupak* para pelaku kejahatan yang tak beradab itu. (Penulis adalah pakar Keistimewaan Yogya)-d

"Di depan sebuah ruko, kita menemukan 9 jeriken berisi miras, masing-masing jeriken berisi 9 liter. Soal kepemilikan miras, masih kami selidiki," tandasnya.

Kapolsek juga membenarkan, Senin pukul 23.30 WIB, terjadi kebakaran di sebuah warung angkringan di kompleks ruko Babarsari. Polisi masih menyelidiki apakah ada unsur kesengajaan atau tidak dalam kejadian itu. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto SIK menyatakan, penyelidikan rentetan peristiwa di Babarsari terus berlanjut. Ia meminta masyarakat menahan diri dan mempercayakan sepenuhnya proses hukum kasus tersebut ke polisi. "Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, akan dimintai pertanggungjawabannya. Saya imbau semua pihak untuk menahan diri, jangan sampai melakukan perbuatan yang malah bisa berdampak hukum," tegasnya (Ayu/Sni/Ria)-f

kekuatan untuk men-*dhupak* warga masyarakat (warga negara) yang bersalah. Sedangkan kebudayaan, meskipun memiliki sistem norma dan adat istiadat, lebih mengedepankan pendekatan moral. Menurut Koentjaraningrat (1981), hukum adalah sistem norma sosial yang memiliki otoritas politis kenegaraan (*attribute of authority*), penerapan universal (global) untuk jangka panjang (*attribute of intention of universal applicator*), ada mekanisme keputusan dari pemegang kekuasaan untuk mengatur hak dan kewajiban (*attribute of obligation*), dengan sistem sanksi (*attribute of sanction*).

Dengan demikian para aparat penegak hukum memiliki fungsi kultural untuk melakukan tindakan tegas bagi para pelaku kejahatan. Masyarakat justru jangan main *dhupak*.> (main hakim sendiri) sebab itu menyebabkan konflik horizontal bahkan perang saudara. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Pemimpin dan raja juga harus tetap kalem supaya jangan menjadi rezim otoriter dan tiran. Tetapi aparat penegak hukum tidak boleh ewuh-pakewuh untuk men-*dhupak* para pelaku kejahatan yang tak beradab itu. (Penulis adalah pakar Keistimewaan Yogya)-d

Dengan demikian para aparat penegak hukum memiliki fungsi kultural untuk melakukan tindakan tegas bagi para pelaku kejahatan. Masyarakat justru jangan main *dhupak*.> (main hakim sendiri) sebab itu menyebabkan konflik horizontal bahkan perang saudara. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Pemimpin dan raja juga harus tetap kalem supaya jangan menjadi rezim otoriter dan tiran. Tetapi aparat penegak hukum tidak boleh ewuh-pakewuh untuk men-*dhupak* para pelaku kejahatan yang tak beradab itu. (Penulis adalah pakar Keistimewaan Yogya)-d

Dengan demikian para aparat penegak hukum memiliki fungsi kultural untuk melakukan tindakan tegas bagi para pelaku kejahatan. Masyarakat justru jangan main *dhupak*.> (main hakim sendiri) sebab itu menyebabkan konflik horizontal bahkan perang saudara. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Pemimpin dan raja juga harus tetap kalem supaya jangan menjadi rezim otoriter dan tiran. Tetapi aparat penegak hukum tidak boleh ewuh-pakewuh untuk men-*dhupak* para pelaku kejahatan yang tak beradab itu. (Penulis adalah pakar Keistimewaan Yogya)-d

BPJS Kesehatan Sukses Pertahankan WTM

YOGYA (KR) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapatkan banyak capaian dan prestasi nasional maupun internasional. Salah satunya, BPJS Kesehatan sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk laporan keuangan tahun 2021 dari akuntan publik.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan, capaian tersebut merupakan predikat WTM kedelapan secara berturut-turut yang diraih sejak BPJS Kesehatan beroperasi tahun 2014, dan predikat ke-30 sejak era PT Askes (Persero). Hal ini menandakan posisi keuangan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia dan audit dari Kantor Akuntan Publik.

"Tentunya berbagai capaian di tengah pandemi Covid-19 ini tidak didapat tanpa kerja keras. BPJS Kesehatan terus membuat gebrakan baru dengan memperhatikan kepada publik. Dengan komitmen yang terus kami kedepankan, hal inilah yang menjadikan BPJS Kesehatan sukses mempertahankan capaian

WTM dalam mengelola keuangan," kata Ghufron dalam siaran persnya, Selasa (5/7).

Ghufron menyebutkan, capaian selanjutnya yang patut diapresiasi adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) di 2021 telah dinyatakan positif. Hal itu dibuktikan dari aset neto yang dimiliki hingga 2021 sebesar Rp 38,7 triliun. Posisi aset neto ini masuk dalam kategori sehat dan mampu memenuhi 5,15 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan.

Dengan capaian tersebut, BPJS Kesehatan juga senantiasa berupaya untuk menciptakan inovasi, khususnya dari sisi finansial dan ekosistem digitalisasi sehingga dapat mempercepat peningkatan mutu layanan.

Selain capaian WTM, sepanjang 2021 ada beberapa capaian yang berhasil diraih BPJS Kesehatan dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan yang diwujudkan dalam beberapa indikator. Dari aspek kepesertaan, per Januari 2022 jumlah kepesertaan Program JKN mencapai 235,7 juta jiwa atau sekitar 86 persen dari total penduduk Indonesia.

"Ini yang akan diregulasi oleh Kementerian. Kita minta segera mungkin bisa keluar Permentannya," kata Airlangga. (Fie)-f

Jelang

Airlangga menegaskan, dalam Permentan itu akan diatur secara detail kriteria ternak sapi yang bisa mendapatkan penggantian dari Pemerintah maksimal Rp 10 juta. Sebab, tidak semua sapi yang dimusnahkan akan mendapatkan penggantian.

Arafah

Di tengah cuaca yang sangat panas, Menag berharap AC yang dipasang di tiap tenda bisa lebih dingin. Sebab, suhu yang lebih dingin di tenda akan memberi kenyamanan jemaah dalam beribadah. Layanan lainnya adalah toilet. Menag melihat itu juga sudah disiapkan lebih banyak, termasuk sejumlah toilet portabel. Ini menurutnya penting agar jemaah tidak lama mengantre, baik saat mandi, bersuci maupun buang hajat.

Selama di Arafah, jemaah akan mendapatkan layanan catering sebanyak lima kali. Layanan catering juga diberikan 10 kali saat di Mina dan satu paket snack di Muzdalifah. Catering akan disiapkan dengan menu Nusantara agar jemaah bisa menikmatinya.

Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, dr Budi Sylvana MARS menyatakan, persiapan kesehatan untuk operasional di puncak haji sudah 100 persen.

Menurut dr Budi, pihaknya akan memobilisasi semua sumberdaya yang ada, dari

petugas kesehatan, obat dan alat kesehatan mulai Rabu, (6/7) pukul 22.00 WAS.

"Alhamdulillah semua persiapan sudah selesai, tim kesehatan termasuk obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan mulai kita kirim besok malam (Rabu malam ini)," ungkap dr Budi.

Sesuai misi Kemenkes untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian jemaah haji sebanyak 1 per mil, pihaknya berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi jemaah. Sesuai rencana Sebanyak 331 petugas kesehatan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan akan bertugas memberikan pelayanan kesehatan di masjid. Pos kesehatan Arafah akan berada di tenda misi haji Indonesia (maktab delapan) dan menjadi tanggung jawab tim kesehatan bandara dibantu petugas bawah kendali operasi (BKO) dari KKH Makkah dan Madinah.

(Ati)-d

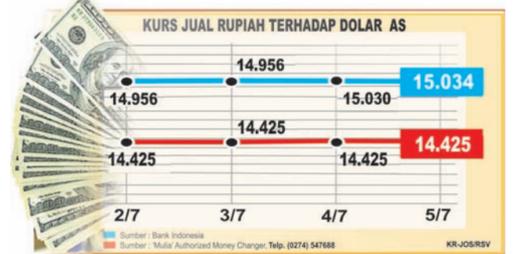
Kapolri:

dan para mantan wakil presiden Try Soetrisno, Yusuf Kalla dan Hamzah Haz, ditandai pemotongan tumpeng di atas mobil terbuka oleh Presiden, lalu diserahkan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Acara ini dimeriahkan berbagai atraksi di antaranya turjun payung dan tari kolosal. Selain itu, di tempat terpisah masih di kompleks Akpol dilangsungkan pesta rakyat. Presiden usai menjadi irup didampingi Ibu Negara Iriani, lalu naik mobil terbuka rantis.

Lebih lanjut dikatakan presiden bahwa seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri. "Saya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri. Kewenangan Polri sangat besar. Organisasi Polri menembus sampai tingkat desa dan setiap hari anggota Polri besentuhan langsung dengan masyarakat", tuturnya.

Disinggung dari survei terbaru Kompas kemarin, 58,3 persen responden menyatakan tindakan Polri sudah sesuai dengan visi presisi. Tapi ingat, 28,6 persen menyatakan belum sesuai.

Selain membaca survei, Presiden mengatahui pihaknya juga terus mengikuti



Prakiraan Cuaca Rabu, 6 Juli 2022						
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu C	Suhu F	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	23-31	70-95	
Sleman	☁	☁	☁	23-30	75-95	
Wates	☁	☁	☁	23-31	70-95	
Wonosari	☁	☁	☁	23-30	70-95	
Yogyakarta	☁	☁	☁	23-31	70-95	

E-Money



Alfriadi Dwi Atmoko, SE MSi Ak CA
Dosen Akuntansi
Universitas Amikom Yogyakarta

HALO pembaca Kedaulatan Rakyat yang inspiratif, kali ini saya akan membahas salah satu teknologi pada industri finansial teknologi salah satunya yaitu e-money. E-

money atau dalam Bahasa Indonesia disebut uang elektronik merupakan uang yang tersimpan dalam bentuk elektronik dan tidak berbentuk dan tidak berwarna maupun tidak ada fisiknya namun dapat digunakan untuk bertransaksi. Pada saat ini penggunaan e-money di Indonesia sudah mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan ini dibarengi dengan bertumbuhnya jumlah volume bertransaksi menggunakan e-money. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga Februari 2022, nilai transaksi uang elektronik

tumbuh 41,35 persen year-on-year mencapai Rp 27,1 triliun. Nilai transaksi perbankan digital juga meningkat 46,53 persen yoy menjadi Rp 3.732,8 triliun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah konsumsi oleh masyarakat juga meningkat. Nah Adapun beberapa keunggulan bertransaksi menggunakan e-money, diantaranya adalah:

buat para penggunanya dapat menghemat waktu untuk bertransaksi, seperti misalnya untuk membeli pulsa telepon atau paket internet, pelanggan tidak perlu lagi berjalan menuju konter terdekat, semua dapat dilakukan dengan menggunakan e-money. Hal tersebut membuat semua menjadi lebih efektif dan efisien sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk pergi ke konter dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang lain.

Mudah dibawa. Keunggulan kedua adalah mudah dibawa. Para pengguna e-money juga diuntungkan dengan kemudahan untuk diisi ulang saldo e-moneynya. Pengisian saldo ini juga

sudah dapat dilakukan di beberapa tempat. Bahkan jika pengguna sudah menggunakan mobile banking dalam smartphonnya juga sudah bisa melakukan isi ulang dimana saja dan kapan saja pengguna berada. Mengurangi risiko uang palsu. Nah pengguna tidak perlu khawatir mengenai peredaran uang palsu dikarenakan e-money sudah dijamin keasliannya karena sudah terdaftar dan juga diawasi oleh pemerintah sehingga para pengguna lebih aman dalam bertransaksi. Penggunaan e-money ini juga terbukti efektif dalam

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park mencegah peredaran uang palsu di masyarakat. Nah itulah beberapa keunggulan menggunakan e-money yang dapat dirasakan oleh penggunanya. Namun kemudahan tersebut juga harus diimbangi oleh kewaspadaan penggunaannya karena mungkin dapat saja terjadi pencurian data apabila kita sebagai pengguna tidak bijak dalam menggunakan e-money dan kita juga harus mengukur kemampuan kita agar terhindar dari perilaku konsumtif.***